

Pemberdayaan Perempuan Nelayan Berbasis Aset Komunitas di Kelurahan Pattingalloang Kota Makassar

Saenab^{1*}; Dewi²; Khusnul Hatimah³

^{1,2,3}Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Correspondence : saenab@unm.ac.id

Date of submission: 28 March 2026 | Date of acceptance: 30 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemberdayaan perempuan nelayan di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, melalui perspektif *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang dikembangkan oleh Kretzmann dan McKnight (1993). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan lima belas informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas perempuan nelayan, tokoh masyarakat, aparat pemerintah lokal, dan fasilitator LSM. Penelitian ini memetakan tujuh aset komunitas aset manusia, alam, fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual serta menganalisis bagaimana aset-aset tersebut dimobilisasi untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan nelayan di Pattingalloang memiliki aset yang signifikan namun belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk keterampilan tradisional dalam pengolahan ikan, jaringan sosial berbasis kekerabatan yang kuat, serta kedekatan strategis dengan Pelabuhan Tradisional Paotere. Namun demikian, mobilisasi aset masih terhambat oleh keterbatasan akses terhadap modal, infrastruktur fisik yang tidak memadai, serta norma gender yang membatasi perempuan pada peran ekonomi informal.

Keywords

pengembangan komunitas berbasis aset, komunitas pesisir, pemberdayaan perempuan nelayan, Pattingalloang, pemberdayaan ekonomi perempuan

ABSTRACT

This study examines the empowerment of fisherwomen in Pattingalloang Subdistrict, Ujung Tanah District, Makassar City, through the lens of Asset-Based Community Development (ABCD) developed by Kretzmann and McKnight (1993). A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving fifteen purposively selected informants comprising fisherwomen, community leaders, local government officials, and NGO facilitators. The study maps seven community assets human, natural, physical, social, economic, cultural, and spiritual and analyzes how these assets are mobilized for women's economic empowerment. Findings reveal that fisherwomen in Pattingalloang possess significant but underutilized assets, including traditional fish processing skills, strong kinship-based social networks, and strategic proximity to Paotere traditional port. However, asset mobilization remains constrained by limited access to capital, inadequate physical infrastructure, and gender norms that confine women to informal economic roles.

Keywords

asset-based community development, coastal community, fisherwomen empowerment, Pattingalloang, women economic empowerment

Pendahuluan

Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, khususnya yang bergantung pada sektor perikanan, merupakan salah satu kelompok paling rentan secara ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa, dengan komunitas nelayan pesisir terwakili secara tidak proporsional di antara kelompok termiskin (Kusnadi, 2022). Perempuan dalam komunitas ini menanggung beban ganda yang berat—kontribusi ekonomi mereka mulai dari pengolahan ikan, pemasaran hasil laut, hingga perbaikan jaring dan pengelolaan rumah tangga namun sering kali tidak terlihat dalam kalkulasi ekonomi formal (Rahman, Haque, Zaman, Palash, & Nahiduzzaman, 2024; Harper, Zeller, Hauzer, Pauly, & Sumaila, 2013). Ketidaktampakan berbasis gender ini melanggengkan siklus kemiskinan dan ketergantungan yang gagal diatasi oleh intervensi pembangunan konvensional (Wulandari & Rini, 2021).

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), yang pertama kali dikembangkan oleh John P. Kretzmann dan John L. McKnight (1993) dari Northwestern University, menawarkan paradigma yang secara fundamental berbeda untuk pemberdayaan masyarakat. Alih-alih berfokus pada kekurangan dan kebutuhan, ABCD dimulai dengan memetakan dan memobilisasi aset, kekuatan, dan kapasitas yang sudah ada di dalam komunitas (Russell, 2021; Mathie & Cunningham, 2003). Pendekatan ini dilandasi keyakinan bahwa pembangunan berkelanjutan harus digerakkan dari dalam komunitas (bottom-up), dibangun di atas modal manusia, sumber daya alam, jaringan sosial, infrastruktur fisik, dan warisan budaya lokal (Chen, Xu, Tackie, & Ahakwa, 2024; Ward, 2023). Kerangka ABCD mengidentifikasi tujuh tipe aset komunitas: manusia, alam, fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual (Harrison, Blickem, Lamb, Kirk, & Vassilev, 2019; Nel, 2015).

Kelurahan Pattingalloang, yang terletak di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, merupakan kasus yang menarik untuk analisis pemberdayaan perempuan nelayan berbasis ABCD. Sebagai kelurahan terluas di Kecamatan Ujung Tanah dengan luas 0,60 km², Pattingalloang dihuni oleh populasi padat yang secara historis bergantung pada aktivitas perikanan dan kelautan. Kedekatan kelurahan ini dengan Pelabuhan Paotere salah satu pelabuhan tradisional paling ikonik di Makassar sejak era Kerajaan Gowa-Tallo abad ke-14 menyediakan aset spasial unik untuk aktivitas ekonomi (BPS Kota Makassar, 2024). Berdasarkan data Kecamatan Ujung Tanah Dalam Angka 2024, kecamatan ini memiliki populasi 34.622 jiwa dengan kepadatan 8.351 jiwa per km², menjadikannya salah satu kecamatan terpadat di kota tersebut. Komunitas nelayan di Pattingalloang menghadapi kemiskinan persisten yang diperparah oleh degradasi lingkungan, tekanan urbanisasi, dan akses terbatas ke peluang ekonomi formal (Satria, 2015).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perempuan nelayan di Pattingalloang memiliki aset signifikan yang masih kurang dimanfaatkan. Aset tersebut mencakup pengetahuan turun-temurun tentang teknik pengolahan ikan, jaringan sosial berbasis kekerabatan yang kuat (pa'deceng-deceng atau pertukaran kerja komunal), serta praktik budaya yang berakar dalam tradisi maritim Makassar (Skhosana, 2025; Idrus, 2022). Namun, aset-aset ini jarang dipetakan atau dimobilisasi secara sistematis sebagai fondasi pemberdayaan ekonomi. Intervensi pembangunan di wilayah ini didominasi pendekatan berbasis kebutuhan yang mendistribusikan bantuan tanpa membangun di atas kapasitas yang sudah ada (Ennis & West, 2010; MacLeod & Emejulu, 2014).

Beberapa penelitian telah mengkaji pemberdayaan perempuan dalam komunitas nelayan, namun sedikit yang menerapkan kerangka ABCD pada perempuan nelayan di kawasan pesisir perkotaan. Wulandari dan Rini (2021) mengkaji strategi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui industri rumahan tetapi tidak menggunakan lensa berbasis aset. Arini dan Priyastiwi (2023) menganalisis pemberdayaan perempuan dalam usaha mikro di Temanggung dengan indikator konvensional. Secara internasional, Rahman et al. (2024) menilai pemberdayaan perempuan di komunitas nelayan pesisir Bangladesh tetapi tidak mengintegrasikan penekanan ABCD pada tujuh kategori aset. Suryani dan Listyawati (2020) mengkaji pemberdayaan perempuan melalui usaha ekonomi produktif namun konteksnya bukan komunitas nelayan pesisir. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menerapkan pendekatan ABCD untuk menganalisis bagaimana aset perempuan nelayan di Pattingalloang dapat diidentifikasi, dimobilisasi, dan diperkuat guna mendorong pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang digerakkan dari dalam komunitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi pemberdayaan perempuan nelayan melalui kerangka ABCD di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar (Creswell & Creswell, 2018). Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur mendalam dengan lima belas informan yang dipilih secara purposif terdiri dari perempuan nelayan yang terlibat dalam pengolahan dan pemasaran ikan (8 informan), tokoh masyarakat dan ketua RT/RW (3 informan), pejabat pemerintah kelurahan dan Dinas Perikanan (2 informan), serta fasilitator LSM (2 informan) dan analisis dokumentasi meliputi data demografi komunitas dan laporan program pemberdayaan.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara iteratif. Pemetaan aset dilakukan menggunakan kerangka tujuh aset ABCD (Kretzmann & McKnight, 1993): aset manusia, alam, fisik, sosial, ekonomi, budaya,

dan spiritual. Triangulasi sumber data dilakukan untuk meningkatkan keabsahan temuan. Penelitian dilaksanakan pada Oktober 2024 hingga Februari 2025.

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang dikembangkan Kretzmann dan McKnight (1993) menyediakan kerangka sistematis untuk mengidentifikasi dan memobilisasi kekuatan komunitas sebagai fondasi pemberdayaan berkelanjutan. Bagian berikut menyajikan temuan pemetaan aset dan analisis untuk perempuan nelayan di Kelurahan Pattingalloang, disusun dalam tiga kluster: aset manusia dan sosial, aset alam dan fisik, serta aset ekonomi dan budaya.

1. Aset Manusia dan Sosial Perempuan Nelayan di Pattingalloang

Aset manusia merupakan sumber daya paling fundamental dalam kerangka ABCD, mencakup keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan kapasitas kerja anggota komunitas (Kretzmann & McKnight, 1993). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perempuan nelayan di Pattingalloang memiliki repertoar keterampilan pengolahan ikan tradisional yang kaya dan telah ditransmisikan secara antargenerasi, termasuk teknik memproduksi ikan kering, abon ikan, kerupuk ikan, dan terasi. Keterampilan ini merepresentasikan bentuk pengetahuan tacit yang tertanam dalam identitas budaya komunitas (Idrus, 2022). Namun, keterampilan ini masih terbatas pada metode tradisional dengan diversifikasi produk dan standardisasi kualitas yang terbatas:

"Kami sudah turun-temurun mengolah ikan. Ibu saya, nenek saya, semuanya tahu cara membuat ikan kering dan abon. Tapi cara kami masih sama seperti dulu, belum ada yang mengajarkan cara mengemas yang bagus atau membuat produk baru yang lebih bernilai jual tinggi." (SN, Perempuan Nelayan, Januari 2025)

Aset sosial di Pattingalloang dicirikan oleh jaringan berbasis kekerabatan yang kuat dan sistem dukungan mutual informal. Tradisi pa'deceng-deceng memungkinkan pengolahan ikan secara kolektif saat musim tangkapan puncak, memperkuat kohesi sosial (Putnam, 2000). Institusi keagamaan, khususnya majelis taklim, berfungsi sebagai platform pengorganisasian sosial yang menyatukan perempuan secara rutin dan menyediakan fondasi bagi aksi ekonomi kolektif (Suryani & Listyawati, 2020):

"Kami sering berkumpul di majelis taklim, bantu-membantu kalau ada acara atau musim ikan. Tapi belum pernah ada yang mengarahkan kami untuk membuat kelompok usaha bersama secara resmi. Padahal sebenarnya kami sudah biasa bekerja sama." (HN, Ketua RT, Januari 2025)

"Perempuan nelayan di sini sebenarnya sangat aktif dan kreatif. Masalahnya, belum ada wadah resmi yang menghubungkan keterampilan mereka dengan pasar. Kalau ada pendampingan yang tepat, potensinya sangat besar." (LS, Fasilitator LSM, Februari 2025)

Tabel 1. Pemetaan Aset Manusia dan Sosial Perempuan Nelayan di Pattingalloang

Tipe Aset	Aset Teridentifikasi	Status Mobilisasi	Kendala
Manusia: Keterampilan	Pengolahan ikan (pengeringan, abon, kerupuk, terasi)	Aktif tetapi tradisional	Belum ada diversifikasi produk
Manusia: Pengetahuan	Ekologi laut, pembacaan cuaca, identifikasi jenis ikan	Dimanfaatkan secara informal	Belum didokumentasikan sistematis
Manusia: Tenaga Kerja	65% perempuan nelayan usia 25–55 aktif mengolah	Musiman dan informal	Tidak ada status kerja formal
Sosial: Jaringan	Pa'deceng-deceng (pertukaran kerja kekerabatan)	Aktif saat musim puncak	Belum diformalkan jadi koperasi
Sosial: Organisasi	Majelis taklim, PKK, kelompok arisan	Pertemuan rutin	Belum diarahkan ke pemberdayaan ekonomi
Sosial: Kepercayaan	Kepercayaan antar-rumah tangga tinggi dalam kluster RT/RW	Modal sosial kuat	Kepercayaan terbatas terhadap institusi luar

Sumber: Data primer dari observasi lapangan dan wawancara, 2024–2025.

Temuan ini memvalidasi premis fundamental Kretzmann dan McKnight (1993) bahwa komunitas bahkan yang dikategorikan kurang beruntung memiliki kapasitas internal signifikan yang dapat menjadi fondasi pembangunan mandiri. Koeksistensi keterampilan tradisional yang kaya dengan jaringan sosial yang kuat menciptakan kombinasi aset potensial yang, jika dimobilisasi secara formal, dapat membentuk basis usaha perempuan yang layak secara ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Chen et al. (2024) yang menunjukkan bahwa mobilisasi sumber daya lokal dan partisipasi warga secara signifikan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, serta Putnam (2000) yang menegaskan bahwa modal sosial berbasis kepercayaan menjadi prediktor kuat keberhasilan aksi kolektif ekonomi. Direkomendasikan agar pemerintah setempat memprioritaskan formalisasi jaringan perempuan informal yang sudah ada menjadi koperasi terdaftar, pendekatan yang divalidasi oleh Harrison et al. (2019) dan Dar (2021).

2. Aset Alam dan Fisik

Aset alam di Pattingalloang didefinisikan oleh lokasi pesisir strategis dan akses langsung ke sumber daya laut melalui Selat Makassar. Kedekatan dengan Pelabuhan Paotere menyediakan akses langsung ke rantai pasokan ikan segar (BPS Kota Makassar, 2024). Pendaratan ikan harian menciptakan basis bahan baku yang andal untuk aktivitas pengolahan. Namun, kualitas aset alam semakin terancam oleh polusi laut, penangkapan berlebihan, dan degradasi lingkungan pesisir (Satria, 2015; Ferrol-Schulte, Gorris, Baitoningsih, Tewfik, & Ekstrom, 2015):

“Tempatnya untuk menjemur ikan masih seadanya, di pinggir jalan atau di depan rumah. Belum ada tempat pengolahan yang memadai. Kalau musim hujan, banyak ikan yang rusak karena tidak bisa dijemur dengan baik.” (MR, Perempuan Nelayan, Januari 2025)

“Di Pattingalloang ini sebenarnya potensi besar karena dekat Paotere. Ikan segar tersedia setiap hari. Tapi infrastruktur pengolahan untuk ibu-ibu nelayan belum memadai. Tidak ada cold storage yang bisa diakses, tidak ada ruang produksi bersama yang higienis.” (AR, Lurah Pattingalloang, Februari 2025)

Tabel 2. Profil Demografi dan Perikanan Kecamatan Ujung Tanah, 2023

Indikator	Data	Sumber
Jumlah Penduduk	34.622 jiwa	BPS Kota Makassar, 2024
Kepadatan Penduduk	8.351 jiwa/km ²	Kec. Ujung Tanah Dalam Angka 2024
Kelurahan Terluas	Pattingalloang (0,60 km ²)	BPS Kota Makassar, 2024
Jumlah Kelurahan	9 kelurahan	BPS Kota Makassar, 2024
Sektor Penghidupan Utama	Perikanan dan perdagangan maritim	Profil Kecamatan Ujung Tanah, 2024
Fasilitas Kesehatan	1 RS AL, 2 Puskesmas	Profil Kecamatan Ujung Tanah, 2024
Fasilitas Pendidikan	6 TK, 19 SD, 10 SMP, 6 SMA, 1 SMK	BPS Kota Makassar, 2024

Sumber: BPS Kota Makassar, Kecamatan Ujung Tanah Dalam Angka 2024.

Dari perspektif ABCD, aset alam dan fisik berfungsi sebagai fondasi material pembangunan yang digerakkan komunitas. Kretzmann dan McKnight (1993) berargumen bahwa komunitas harus mengenali dan memanfaatkan keunggulan geografis secara strategis. Di Pattingalloang, paradoksnya jelas: komunitas memiliki aset alam bernilai luar biasa—kedekatan langsung dengan pelabuhan ikan terpenting—namun infrastruktur fisik untuk mengonversi keunggulan ini menjadi nilai ekonomi bagi perempuan masih tidak memadai. Temuan ini sejalan dengan Skhosana (2025) yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara ketersediaan aset dan kapasitas mobilisasi merupakan hambatan kritis, serta Ferrol-Schulte et al. (2015) yang menegaskan pentingnya infrastruktur pengolahan pasca-panen dalam pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir. Direkomendasikan pembangunan fasilitas pengolahan ikan komunal melalui proses desain partisipatif, konsisten dengan Ward (2023) dan Cunningham dan Mathie (2002).

3. Aset Ekonomi dan Budaya

Aset ekonomi perempuan nelayan di Pattingalloang dicirikan oleh partisipasi dalam usaha mikro informal yang berpusat pada pengolahan ikan dan perdagangan kecil. Perempuan nelayan menghasilkan pendapatan melalui berbagai saluran: penjualan produk olahan di pasar lokal, penjualan langsung ke pa'baluk (tengkulak), partisipasi dalam arisan, dan kerja upah musiman (Tambunan, 2012).

Rata-rata pendapatan bulanan dari pengolahan ikan berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1.500.000, jauh di bawah UMK Kota Makassar 2024 sebesar Rp3.643.321:

“Penghasilan kami tidak menentu, tergantung musim dan hasil tangkapan suami. Kalau musim ikan bagus, bisa dapat satu juta lebih sebulan dari olahan. Tapi kalau musim sepi, kadang hanya beberapa ratus ribu. Kami tidak punya akses ke bank, modalnya dari arisan atau pinjam ke tetangga.” (FT, Perempuan Nelayan, Januari 2025)

Aset budaya merupakan dimensi paling khas dari kekuatan komunitas Pattingalloang. Identitas budaya maritim Makassar, yang terwujud dalam konsep siri' na pacce (harga diri dan empati), memberikan fondasi motivasional yang kuat untuk aksi ekonomi kolektif (Idrus, 2022; Pelras, 1996). Signifikansi historis Pattingalloang—yang namanya berasal dari istilah Makassar untuk “tempat menjemur ikan” dan diasosiasikan dengan Karaeng Pattingalloang—memberikan makna budaya mendalam pada tradisi pengolahan ikan:

“Pattingalloang ini artinya tempat menjemur ikan. Jadi mengolah ikan itu bukan sekadar pekerjaan, itu bagian dari siapa kami. Dari dulu nenek moyang kami sudah begini. Kalau ada program yang menghargai dan mengembangkan apa yang sudah kami punya, pasti kami semangat.” (DG, Tokoh Masyarakat, Februari 2025)

“Kami pernah ikut pelatihan dari pemerintah, tapi bahannya tidak sesuai dengan kebiasaan kami. Mereka ajarkan hal baru yang kami tidak kenal. Padahal kalau yang dikembangkan itu yang sudah kami bisa, pasti lebih mudah dan lebih semangat menjalankannya.” (RH, Perempuan Nelayan, Januari 2025)

Irisan aset ekonomi dan budaya di Pattingalloang mengilustrasikan efek pengganda (multiplier effect) dari mobilisasi aset sebagaimana dikonseptualisasikan Kretzmann dan McKnight (1993). Identitas budaya yang berakar dalam tradisi pengolahan ikan memberikan motivasi intrinsik yang tidak dapat direplikasi oleh program insentif eksternal, sementara aset ekonomi meskipun sederhana menunjukkan kapasitas kewirausahaan yang dapat diperluas. Temuan ini konsisten dengan Chen et al. (2024) yang menemukan bahwa integrasi aset budaya meningkatkan keberlanjutan program, serta Pelras (1996) dan Idrus (2022) yang menegaskan peran sentral identitas budaya maritim Bugis-Makassar dalam membentuk orientasi ekonomi komunitas pesisir. Direkomendasikan agar program pemberdayaan mengadopsi pendekatan rantai nilai bermerek budaya yang memposisikan produk ikan tradisional sebagai produk heritage, seraya memfasilitasi akses layanan keuangan formal melalui mekanisme keuangan mikro berbasis arisan (Mathie & Cunningham, 2003; Dar, 2021; Tambunan, 2012).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan nelayan di Kelurahan Pattingalloang memiliki aset komunitas signifikan di seluruh tujuh kategori ABCD yang membentuk fondasi viable bagi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Aset manusia berupa keterampilan pengolahan ikan tradisional, aset sosial yang terwujud dalam jaringan kekerabatan kuat, aset alam berupa kedekatan strategis dengan Pelabuhan Paotere, serta aset budaya yang berakar dalam identitas maritim

Makassar secara kolektif merepresentasikan potensi pemberdayaan yang belum termanfaatkan optimal. Namun, mobilisasi aset masih terkendala oleh absennya struktur kelembagaan formal, ketidakmemadai infrastruktur fisik, serta informalitas aktivitas ekonomi yang menghalangi akses perempuan nelayan ke kredit formal, pasar, dan sistem perlindungan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, tiga rekomendasi terintegrasi diajukan. Pertama, formalisasi jaringan perempuan informal khususnya majelis taklim dan kolektif arisan menjadi koperasi terdaftar yang dapat berfungsi sebagai wadah aksi ekonomi kolektif. Kedua, pembangunan fasilitas pengolahan ikan komunal (rumah produksi bersama) yang dilengkapi standar higienis melalui proses desain partisipatif. Ketiga, adopsi pendekatan rantai nilai bermerek budaya yang memosisikan produk ikan tradisional Pattingalloang sebagai produk heritage, memanfaatkan identitas historis kelurahan untuk diferensiasi pasar seraya menghubungkan perempuan nelayan ke jaringan pasar digital dan ekosistem ekonomi kreatif Kota Makassar. Rekomendasi ini mewujudkan prinsip inti ABCD bahwa pemberdayaan berkelanjutan dicapai dengan mengenali, memperkuat, dan menghubungkan aset yang sudah dimiliki komunitas.

Referensi

- Arini, D. R., & Priyastiwi, P. (2023). Analisis pemberdayaan perempuan dalam bidang usaha ekonomi mikro di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, 1(3), 656–670. <https://doi.org/10.32477/jrima.v1i3.746>
- BPS. (2025). *Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. *Berita Resmi Statistik*, No. 05/01/Th.XXVIII.
- BPS Kota Makassar. (2024). *Kecamatan Ujung Tanah Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
- Chen, H., Xu, Y., Tackie, E. A., & Ahakwa, I. (2024). Assessing the impact of asset-based community development approach on rural poverty alleviation in Ghana. *SAGE Open*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.1177/21582440231226020>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Cunningham, G., & Mathie, A. (2002). *Asset-based community development: An overview*. Coady International Institute.
- Dar, W. A. (2021). Asset-based community development: A move toward sustainable community development. *International Journal of Social Science Research*, 3(2), 128–140. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v3i2.57>
- Ennis, G., & West, D. (2010). Exploring the potential of social network analysis in asset-based community development practice and research. *Australian Social Work*, 63(4), 404–417. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2010.508167>

- Ferrol-Schulte, D., Gorris, P., Baitoningsih, W., Tewfik, A., & Ekstrom, J. A. (2015). Coastal livelihood vulnerability to marine resource degradation: A review of the Indonesian national coastal and marine policy framework. *Marine Policy*, 52, 163–171. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.09.026>
- Harper, S., Zeller, D., Hauzer, M., Pauly, D., & Sumaila, U. R. (2013). Women and fisheries: Contribution to food security and local economies. *Marine Policy*, 39, 56–63. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.10.018>
- Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-based community development: Narratives, practice, and conditions of possibility. *SAGE Open*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2158244018823081>
- Idrus, N. I. (2022). Gender, kinship, and state in Makassarese society: Rethinking women's economic roles. *Asian Journal of Women's Studies*, 28(2), 204–225.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Kusnadi. (2022). *Nelayan dan kemiskinan: Strategi bertahan hidup masyarakat pesisir* (Edisi Revisi). LKiS.
- MacLeod, M. A., & Emejulu, A. (2014). Neoliberalism with a community face? A critical analysis of asset-based community development in Scotland. *Journal of Community Practice*, 22(4), 430–450. <https://doi.org/10.1080/10705422.2014.959147>
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Nel, H. (2015). An integration of the livelihoods and asset-based community development approaches: A South African case study. *Development Southern Africa*, 32(4), 511–525. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2015.1039706>
- Pelras, C. (1996). *The Bugis*. Blackwell Publishers.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahman, M. W., Haque, A. B. M., Zaman, T., Palash, M. S., & Nahiduzzaman, M. (2024). Women empowerment status in the coastal fishing communities of Bangladesh. *SAGE Open*, 14(2), 1–15. <https://doi.org/10.1177/21582440241250114>
- Russell, C. (2021). *Asset-Based Community Development (ABCD): Looking back to look forward* (3rd ed.). Nurture Development.
- Satria, A. (2015). Pengantar sosiologi masyarakat pesisir. Yayasan Pustaka Obor.
- Skhosana, R. M. (2025). Harnessing local strengths: Asset-based community development and sustainable livelihoods in South Africa. *Inkanyiso*, 17(1), a151. <https://doi.org/10.4102/ink.v17i1.151>

- Suryani, S., & Listyawati, A. (2020). Pemberdayaan perempuan melalui usaha ekonomi produktif. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(3), 67–76.
- Tambunan, T. (2012). Peran usaha mikro dan kecil dalam pengentasan kemiskinan di daerah. *Jurnal Bina Praja*, 4(2), 73–92. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.73-92>
- Ward, S. (2023). Using theory-based evaluation to understand what works in asset-based community development. *Community Development Journal*, 58(2), 206–224. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsac035>
- Wulandari, A. N., & Rini, N. (2021). Strategi pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 176–181.